

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP TINDAK PENCEGAHAN KECURANGAN
(Studi pada Kantor Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo)**

**Fatma Karunia Hidayati
Harjanti Widiastuti
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogtakarta
Email: Fatmakaruniaa@gmail.com**

ABSTRACT

Fraud is an act that violates the law that can be done outside or inside the organization with the aim of obtaining personal or group benefits that harm other parties. Fraud can occur in the private and government sectors. Fraud can be prevented by activating or maximizing the existing of internal controls, besides that fraud can also be prevented by implementing the Good Government Governance system.

This study aims to analyze the Effect of Internal Control and Good Government Governance on Fraud Prevention in the Village Government Office in Purworejo Regency. The subjects in this study were those who had responsibility in decision making, supervision and budgeting for village funds. In this study a sample of 84 villages were randomly selected (Random Sampling). Linear Regression was used as the analytical tool for this study.

Based on the analysis that has been done, the results show that internal control and Good Government Governance have a significant positive effect on the action of fraud prevention. In the prevention of fraud, an organization can implement or follow up on internal controls and Good Government Governance.

Keywords: Internal Control, Good Government Governance and Action of fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan bahaya yang cukup mengancam di setiap perusahaan maupun organisasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter* setiap tahunnya terdapat rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban kecurangan (ACFE, 2016). Survei yang dilakukan oleh *ACFE Indonesia Chapter* yang bekerja sama dengan *STIE Perbanas Surabaya* menyatakan bahwa kecurangan

terbanyak yang dilakukan di Indonesia adalah korupsi (ACFE, 2016). Tindak kecurangan korupsi paling sering dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan cukup besar dibandingkan tindak kecurangan lainnya seperti penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Selain merugikan, tindak kecurangan korupsi juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam pengungkapannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan tindak kecurangan korupsi tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan menyangkut beberapa pihak.

Penyebab utama dari maraknya terjadinya tindak kecurangan korupsi antara lain adalah kurangnya pengendalian internal, sistem pengelolaan organisasi dan tindakan hukum yang dirasa kurang tegas terhadap tersangka kasus tindak kecurangan korupsi. Menurut Arens *et al* (2014) kecurangan terjadi karena terdapat lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak internal organisasi, serta kecurangan dapat dilakukan karena adanya tekanan, kesempatan dan sikap.

Tuonakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan untuk menangani resiko bisnis dan kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) pada SKPD yang ada di Provinsi Maluku Utara, menyatakan bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan pencegahan *fraud* dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi. Ketika perusahaan atau suatu organisasi telah menerapkan pengendalian internal yang baik, maka perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikatakan mempunyai tingkat resiko

kecurangan yang rendah, serta tindak kecurangan yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir sejak dini.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 pada bidang Keuangan Negara (Ketentuan & Pasal, 2008) dan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara menegaskan bahwa terdapat asas pengelolaan Keuangan Negara yang mengarah pada *best practice* (ide atau gagasan tentang teknik, metode dan sebagainya yang lebih efektif dibanding teknik, metode lainnya) dalam rangka pencapaian sistem kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa untuk mengelola keuangan negara dengan baik pemerintah dapat menerapkan sistem kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *Good Government Governance* (GGG). *Good Government Governance* (GGG) ini merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dengan menerapkan transparansi data, kemandirian, partisipasi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Nyoman (2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan maupun organisasi yang baik serta diikuti dengan komitmen yang tinggi maka akan berdampak baik pada kinerja pegawai dan menghasilkan kinerja keuangan organisasi yang efisien.

Selama tahun 2017 pelaku tindak kecurangan korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah, tercatat terdapat 43 perkara korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4 (ICW, 2017). Tindak kecurangan korupsi sendiri tidak hanya selalu dilakukan oleh politisi-politisi besar namun juga dapat dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa. Berdasarkan berita yang dimuat pada Detik News (2017) menyampaikan bahwa di Kabupaten

Purworejo tercatat pada bulan Agustus 2017 dilaporkan sebanyak 14 kepala desa menjadi tersangka kasus korupsi dana desa yang merugikan negara. Tindak kecurangan yang dilakukan adalah melakukan *mark up* dan manipulasi jumlah barang yang dibeli. Seorang pemimpin atau pemengku kepentingan seharusnya mempunyai sifat amanah yang dapat menyampaikan apa yang *principal* inginkan, serta dapat mendahulukan kepentingan bersama guna mencapai tujuan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta (2014) dengan sampel 30 pegawai kantor inspektorat Kota Administrasi Jakarta menyatakan bahwa *good government governance* sangat dibutuhkan dalam tindak pencegahan kecurangan. Menurut penelitian tersebut apabila telah terjadi kecurangan pada suatu organisasi maka hal yang dapat dilakukan adalah mencari sebab-sebab terjadinya kecurangan sehingga dapat menjadi perbaikan dalam sistem organisasi guna menghindari kejadian-kejadian serupa terjadi kembali. Selain itu, *good government governance* pada suatu pemerintahan sangat dibutuhkan guna meminimalisir terjadinya kecurangan.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penentuan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dan dapat melihat apakah pemerintahan telah menerapkan pengendalian internal dan *good government governance* yang baik atau belum. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan variabel *good corporate governance* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengganti variabel *good corporate governance* menjadi variabel *good government governance*, dengan alasan untuk

mengukur tata kelola pemerintahan alat ukur *good government governance* lebih tepat dan indikator yang digunakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang tercantum pada undang-undang yang berlaku.

RERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

RERANGKA TEORI

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana *steward* lebih mementingkan pencapaian suatu organisasi dibandingkan tujuan ataupun kepentingan individu (Donaldson dan Davis, 1989). Teori ini juga mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar seorang *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan *principal*. Apabila kepentingan dari *steward* dan *principal* berbeda maka *steward* akan berusaha bekerja sama sehingga mendapatkan keputusan yang dianggap adil dari pada menentanginya.

2. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang di implementasikan oleh manajemen perusahaan dan dewan direksi, serta dirancang untuk memenuhi lima tujuan, yaitu menjaga aset, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, mempromosikan efisiensi operasional, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, dan menaati persyaratan hukum (Horrison dkk, 2011).

3. *Good Government Governnace*

Pratolo dan Jatmiko (2017) menyatakan bahwa *Good Government Governance* (GGG) adalah suatu penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Sutjiatmi (2012) menyatakan bahwa *Good Government Governance* (GGG) yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

4. Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) merupakan pernyataan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dilakukan secara sengaja, untuk tujuan membujuk pihak lainnya agar bertindak dengan cara yang merugikan pihak bersangkutan, kecurangan merupakan tindakan paling tidak etis dalam bisnis (Horrison dkk, 2011).

PENURUNAN HIPOTESIS

1. Pengendalian Internal terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan

Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik ketika seorang pemimpin atau pemangku kepentingan tidak selalu mementingkan kepentingan pribadi. Namun, selalu dapat mengutamakan kepentingan bersama untuk

mencapai tujuan bersama. Tindak pencegahan kecurangan pada suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan situasi internal organisasi sehingga ketika lingkungan internal suatu organisasinya baik, maka dapat di pastikan bahwa tindak pencegahan kecurangan pada organisasi tersebut telah diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013), Tuanakotta (2013) dan COSO (1994) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskannya hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan.

2. *Good Government Governance* (GGG) terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan

Suatu pemerintahan yang baik membutuhkan seorang sesok peimpin yang amanah., sehingga dapat menyampaikan saran dari masyarakat. Apabila *Good Government Governance* (GGG) telah diterapkan dengan tepat dan baik maka akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga, dapat menjadi salah satu tindak pencegahan terjadinya kecurangan. Selain itu, apabila dalam suatu organisasi telah menjalankan kepatuhan hukum yang berlaku, mementingkan kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektif dan efisien maka, pegawai pada organisasi tersebut tidak mempunyai peluang untuk melakukan tindak kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2009) dan Beawiharta (2014) menyatakan

bahwa *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan.

METODE PENELITIAN

1. Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Purworejo dengan responden kepala desa dan kaur keuangan di masing-masing Kantor Pemerintahan Desa yang dijadikan sampel penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan cara pengisian kuesioner oleh responden.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan *random sampling*, dimana sampel diambil secara acak dari 16 kecamatan yang terdiri dari 469 desa. Perhitungan berapa banyak sampel yang digunakan adalah dengan cara mengalikan jumlah desa di setiap Kecamatan dengan dua per 11. Angka dua tersebut diambil dari jumlah minimal desa yang akan dijadikan sampel, sedangkan angka 11 diperoleh dari jumlah desa terkecil. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh sampel sebanyak 84 Kantor Pemerintahan Desa dengan responden sebanyak 168 responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan skala *likert* yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu sangat tidak setuju (STS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat setuju (SS) dan kurang Setuju (KS). Setelah memperoleh data dari kuesioner yang diberikan, maka selanjutnya dilakukan perhitungan nilai untuk setiap kuesioner yang diperoleh, yang dimana masing- masing item dari kuesiner mempunyai bobot nilai yang berbeda.

Tabel 1
Perhitungan Nilai

Jawaban	Bobot Nilai	
	Pertanyaan Positif	Pertanyaan Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pengendalian Internal (X_1)

Variabel pengendalian internal akan diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang dikembangkan oleh Arens *et al.* (2014) yang terdiri dari 5 indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, sistem informasi, kegiatan pengendalian dan pemantauan. Terdapat 16 pernyataan untuk mengukur variabel independen pengendalian internal tersebut.

b. *Good Government Governance* (GGG) (X_2)

Variabel *Good Government Governance* (GGG) diukur dengan menggunakan instrumen menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Tentang Asas Penyelenggaraan

Pemerintah dalam Beawiharta (2014), yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Terdapat 17 pernyataan untuk mengukur variabel independen *Good Government Governance* (GGG) tersebut.

c. Tindak Pencegahan Kecurangan (Y)

Variabel dependen dari penelitian ini adalah tindak pencegahan kecurangan dimana instrumen yang digunakan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Beawiharta (2017). Terdapat 12 pernyataan untuk mengukur variabel dependen pencegahan kecurangan tersebut.

6. Uji Kualitas Instrumen dan Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji tingkat keandalan alat ukur yang digunakan. Penelitian yang valid adalah penelitian yang terdapat kesamaan dari data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Data dikatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel. Nilai r hitung diperoleh dari *Corrected Item-Total Correlation* pada tabel *Item Total Statistics*. Apabila terdapat data yang tidak valid maka data tersebut tidak disertakan dalam analisis data selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Sunjoyo dkk, 2013). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan SPSS dengan cara melakukan uji

statistic *Cronbach Alpha*. Menurut Nazaruddin (2017) nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah diatas 0,7. Nilai koefisien reliabilitas disini adalah nilai dari *Cronbach Alpha* pada tabel *Reliability Statistic*.

7. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual telah terdistribusi secara normal atau tidak. Residual berdistribusi normal apabila nilai *Sig.* pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi ganda. Pendeteksian terdapat multikolinieritas dapat dilihat pada nilai VIF pada tabel *Coefficients*. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan pada model regresi yang diuji. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka perlu dilakukan uji *Glajser*. Model regresi dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas ketika hasil uji *Glajser* pada tabel *Coefficients* menunjukkan nilai *Sig.* $> 0,05$.

d. Uji Autokorelasi

Penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi. Hal tersebut dikarenakan uji autokorelasi hanya digunakan pada penelitian yang

menggunakan data *time series*, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di satu waktu.

Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan regresi linier berganda dengan rumus, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Pencegahan Kecurangan

a = Konstanta

X₁ = Pengendalian Internal

X₂ = *Good Government Governance*

b₁ = Koefisien regresi X₁

b₂ = Koefisien regresi X₂

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

c. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

d. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama yang ditunjukkan pada tabel ANOVA pada uji regresi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, sampel yang dapat digunakan sebesar 62 sampel Kantor Pemerintahan Desa dengan jumlah responden sebanyak 124 responden.

1. Uji Kualitas Instrumen dan Data

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Sampel	Mean	Median
PENGENDALIAN INTERNAL	16-80	48,00-73,50	61,83	48
GGG	17-85	62,00-84,00	70,71	51
TINDAK PENCEGAHAN KECURANGAN	12-60	43,00-57,00	48,39	36

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

a. Uji Validitas

Pada penelitian ini terdapat item pernyataan yang tidak valid yaitu item pernyataan no dua, sehingga item pernyataan no dua dihapus dan tidak diikut sertakan pada analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pengendalian Internal(X ₁),	0,847	Reliable
2.	Good Government Governance (X ₂)	0,870	Reliable
3.	Tindak Pencegahan Kecurangan (Y)	0,748	Reliable

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Pada penelitian ini semua variabel yang diuji mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini *reliable*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,91685736
Most Extreme Differences	Absolute	,117
	Positive	,072
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,922
Asymp. Sig. (2-tailed)		,363

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4, nilai asymp sig. 2 tailed adalah 0,363 > alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan residual data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,499	3,953		2,909	,005		
	X1	,207	,083	,291	2,500	,015	,502	1,994
	X2	,340	,073	,542	4,665	,000	,502	1,994

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Tabel 5, nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Mode	l	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,78E-015	3,953		,000	1,000
	PENGENDALI AN INTERNAL	,000	,083	,000	,000	1,000
	GCG	,000	,073	,000	,000	1,000

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 nilai Sig. > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,499	3,953		2,909	,005
PENGENDALIAN INTERNAL	,207	,083	,291	2,500	,015
GGG	,340	,073	,542	4,665	,000
<i>Adjusted R Square</i> : 0,587					
F hitung : 44,346					
Sig. F : 0,000					

Sumber: Hasil Output SPSS

Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H1 : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Syarat penerimaan hipotesis adalah ketika nilai Sig. > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Diperoleh nilai Sig. untuk variabel independen pengendalian internal (X1) sebesar 0,015 dimana lebih kecil dari 0,05 hal tersebut menandakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis H1 yang berbunyi “Pengendalian internal berpengaruh terhadap tindak pencegahan kecurangan” diterima. Nilai Sig. untuk variabel independen kedua yaitu *good government governance* sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis H2 yang berbunyi “*Good government governance* berpengaruh terhadap tindak pencegahan kecurangan” diterima.

4. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,587. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mencapai 58,7%. Sedangkan variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini berpengaruh sebesar 41,3%.

5. Uji T

Berdasarkan nilai pada tabel 7 diperoleh nilai T hitung sebesar 2,500 dimana lebih besar dari T tabel sebesar 1,67022 dan memperoleh nilai Sig. sebesar 0,015 dimana lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan. Selain itu pada tabel 7 diperoleh nilai *beta* sebesar 0,207 bernilai positif (+). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan.

Uji T kedua dilakukan pada variabel independen *good government governance* terhadap tindak pencegahan kecurangan, diperoleh nilai T hitung sebesar 4,665 dimana lebih besar dari T tabel sebesar 1,67022 dan memperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Selain itu pada tabel 7 diperoleh nilai *beta* sebesar 0,340 bernilai positif (+). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan.

6. Uji F

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 44,346 dimana lebih besar dari F tabel sebesar 3, 15. Selain itu nilai Sig. F sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun hasil pengujian terhadap hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan. Penelitian ini menunjukkan arah positif dan signifikan yang mengartikan bahwa semakin baik pengendalian internal maka, tindak pencegahan kecurangan telah berjalan dengan baik. Hasil signifikan pada penelitian ini menandakan bahwa pengendalian internal sangat perlu dipertimbangkan dalam tindak pencegahan kecurangan.

Sesuai dengan teori *Stewardship* dimana seorang pemangku kepentingan yang baik adalah yang selalu dapat menyampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya kepentingan bersama dalam suatu organisasi dan bertindak menggunakan mekanisme situasional, dimana seorang pemimpin mampu mengambil keputusan yang adil pada situasi apapun. Selain itu teori *Stewardship* merupakan teori yang menyampaikan

bahwa seorang pemimpin yang amanah diperlukan untuk kemajuan suatu organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Sulaeman (2013) , Tuonakotta (2013) dan COSO (1994) yang menyatakan bahwa tindak pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan pengendalian internal yang baik dan tepat.

b. Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa hipotesis kedua diterima dengan arah positif dan signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik penerapan *good government governance* maka penerapan tindak pencegahan kecurangan semakin meningkat. Hasil penelitian menandakan bahwa *good government governance* merupakan salah satu hal yang penting dalam tindak pencegahan kecurangan di dalam organisasi.

Asas penyelenggaraan pemerintahan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah salah satunya ada asas kepentingan umum, dimana pemerintahan harus dapat mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan teori *stewardship* dimana seorang pemimpin harus dapat mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, selain itu seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah yang dapat menyampaikan saran dan masukan dari *principal* atau masyarakat. Asas akuntabilitas juga sangat

diperlukan pada suatu pemerintahan, hal tersebut dikarenakan untuk mencapai sistem tata kelola pemerintahan yang baik maka dibutuhkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusnardi (2009) dan Beawiharta (2014) yang menyatakan bahwa ketika suatu pemerintahan telah menrapkan *good government governance* yang baik dan tepat maka tindak pencegahan kecurangan akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Variabel pengendalian internal dan *good government governance* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan. Hal ini berarti apabila pengendalian internal dan *good government governance* telah dilaksanakan dengan baik maka pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Untuk memaksimalkan tindak pencegahan kecurangan, pemerintah dapat melakukan pembagian tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan serta memastikan bahwa tidak terdapat tumpang tindih pembagian tugas, dan pemerintah dapat melakukan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana pembuatan laporan keuangan yang baik dan tepat guna meminimalisir kesalahan pada pelaporan keuangan.

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat melakukan uji kontrol jawaban responden dan melakukan pengecekan kembali jawaban responden agar dapat melihat konsistensi jawaban responden. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen seperti asimetri informasi, eksternal auditor dan kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, 2016, Survei ACFE Indonesia 2016, *III*(Chapter), 1–62.
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, *1*(2).
- AreArens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S., 2014, Auditing Dan Jasa Assurance, 1–521.
- Aulia Listi, N, 2013, Akuntansi Sektor Publik, 163–172.
- Beawiharta, Innosanto, 2014, Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu KOta dan Implementasi *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014. *Jurnal e-Proceeding of Management*, Vol.1, 3, Desember, hal. 226-237.
- COSO, 1994, *Internal control intergrated framework*. New York: AIGPA' s Publication Devision.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC.
- DPR RI, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
- Gusnardi, 2009, Pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, audit internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Akuntansi*, *15*(1), 137.
- Harrison Jr. W. T, Horngren C. T., Thomas C. W., dan Suwardy T., 2011, *Akuntansi Keuangan*, Erlangga.
- Hariyanto, Ibnu, ICW: Dalam 6 Bulan 226 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 1,83 T, <https://news.detik.com/>. Diakses 3 Januari 2019 pk 09.00 WIB.
- ICW, 2017, Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017. 1-30
- James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management." *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 2247, 1997.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H., 1976, "Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics*, *3*, hal. 305–360.
- Ketentuan, B. I., & Pasal, U., 2008, Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Memutuskan : Menetapkan : Undang-Undang

Tentang Keuangan Negara, 26(5), 1–40.

- Khanna, A., & Arora, B., 2009, *A study to investigate the reasons for bank frauds and the implementation of preventive security controls in indian banking industry. International Journal of Business Science and Applied Management*, 4(3), 1–21.
- Mayangsari dan Wandanarum , 2013, *Auditing pendekatan sektor publik dan privat*. Jakarta: Media Bangsa.
- Nazaruddin, Ietje, dan Agus Tri Basuki, 2017, *Analisis Statistik dengan SPSS*, Danisa Media
- Nyoman, I Dewa , 2013, *Akuntansi Forensik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Pratolo, Suryo dan Bambang Jatmiko, 2017, *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*, LP3MRaharjo, Eko, 2010, *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi.
- Sukrisno, A., 2012, *Auditing petunjuk praktispemeriksaan akuntan oleh Akuntan Publik (Jilid I Edisi Keempat)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Soleman, R., 2013, *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74.
- Sunjoyo dkk, 2013. *Aplikasi SPSS Untuk Smart Riset: Program Ibm SPSS 21*, PT. Alfabeta.
- Sutjiatmi, S., 2012, *Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah. E-Journal UPS*, 10(1).
- Thaibi, Muhammad, 2017, *Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada Rumah Sakit di Kabupaten Bone*.
- Tuanakotta. T., 2013, *Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.